

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting yang digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi¹. Misalnya, bank bertindak sebagai kreditor akan mengambil keputusan untuk memberikan kredit dalam jumlah yang besar pada sebuah perusahaan maka bank perlu meminta laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui kredit tersebut.

Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen dan akan dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, kreditor, dan pemilik. Pengguna laporan keuangan mengharapkan laporan keuangan berisi informasi-informasi keuangan yang dapat dipercaya. Karena laporan keuangan dibuat oleh pihak

¹ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 12, (Jakarta : Salemba Empat, 2004)

manajemen tentu ada kemungkinan laporan keuangan dapat menjadi bias sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya lagi. Selain itu, kerumitan transaksi dan bertambahnya volume data dalam pembuatan laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pihak ketiga yang independen dan berkompeten untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dipercaya. Pihak ketiga inilah yang sering disebut dengan Akuntan Publik.

Akuntan publik bertugas untuk melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Hasilnya berupa laporan auditor independen. Laporan auditor independen inilah yang nantinya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik diharapkan dapat bertindak sebagai pihak yang independen sehingga hasil pengauditan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Selain menawarkan jasa pengauditan atas kewajaran laporan keuangan, kantor akuntan publik juga melayani jasa non audit seperti jasa konsultasi, kompilasi, perpajakan dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan². Kepercayaan yang besar pemakai laporan keuangan audit dan jasa yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan mutu auditnya³. Untuk memperhatikan mutunya, kantor akuntan publik harus memiliki suatu alat pengendali yaitu Sistem Pengendalian Mutu.

² Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2003

³ Christiawan, Yulius Jogi., 2005, "Aktifitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan Historis (Studi Kasus pada beberapa kantor akuntan publik di Surabaya)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Edisi Mei 2005, Volume 7 No.1, Hal 61-88

Standar Pengendalian Mutu diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Sistem Pengendalian Mutu mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kantor akuntan publik untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan Standar Profesional Akuntan Publik⁴. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, setiap kantor akuntan publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Sifat dan lingkup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan kantor akuntan publik tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran kantor akuntan publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya dan pertimbangan biaya-manfaat.

Dengan adanya standar ini diharapkan kantor akuntan publik dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan dengan mematuhi standar pengendalian mutu. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan⁵. Hal ini juga berlaku bagi akuntan publik. Kantor akuntan publik selalu berusaha untuk memiliki staf-staf yang profesional. Contohnya kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang yang mempunyai misi untuk menjadi

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hal 16.000.2

⁵ Mulyadi, Pemeriksaan Akuntan, Yogyakarta : STIE YKPN, 1992, hal 43-44

kantor akuntan yang profesional dan *credible* secara konsisten memberikan manfaat lebih daripada harapan klien dan karyawannya. Kantor akuntan publik (KAP) ini merupakan hasil merger antara KAP Drs. Bambang Hartadi, KAP Supardan & Mulyana, KAP Doli, Bambang, & Sudarmadji, KAP Bambang Hariadi & Rekan, KAP Iskandar Pane, dan akuntan publik Drs. Erfan (lihat Lampiran 2 mengenai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 295/KM.5/2005). Kantor akuntan publik ini secara keseluruhan memiliki 12 partner dan mempunyai 4 cabang di Indonesia yaitu 2 KAP cabang di Jakarta, 1 KAP cabang di Malang dan 1 KAP cabang di Yogyakarta.

Kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta beralamatkan di Gedung Pusat UTY Lt.1, Jalan Ringroad Utara, Jombor, Sleman Yogyakarta. Kantor akuntan publik ini berdiri tanggal 19 Januari 2006. Untuk kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta memiliki 1 partner dan 34 staf. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, kantor akuntan publik ini telah memiliki 38 klien baik yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di wilayah luar Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Klaten, Magelang dan kota-kota lainnya. Klien kantor akuntan publik ini bergerak diberbagai bidang usaha, seperti bank, hotel, restoran dan lain-lain. Dengan banyaknya staf yang dimiliki kantor akuntan publik ini maka kantor akuntan publik perlu memiliki sistem pengendalian mutu supaya staf-staf tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Keprofesionalan staf kantor akuntan publik akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi pada hasil jasa yang diberikan

akuntan publik. Hasil pekerjaan akuntan publik harus dapat diandalkan karena menyangkut kepentingan umum. Untuk itulah peneliti tertarik untuk menguji kepatuhan standar pengendalian mutu yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta.

I.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah desain Sistem Pengendalian Mutu (SPM) pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ?
2. Apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta telah sesuai dengan SPAP ?

I.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta yang merupakan cabang dari kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang pusat

2. Periode pengamatan adalah bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2006

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji kepatuhan Sistem Pengendalian Mutu pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta.

b. Manfaat penelitian

1. Bagi kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang Kantor Yogyakarta.

Memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta.

2. Bagi Penulis

Memberikan pembelajaran dan pengalaman baru bagi penulis berkaitan dengan bidang auditing terutama dalam sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik.

I.5 Metodologi Penelitian

a. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Salah satu metode yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dengan staf kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan atau aktivitas yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Inspeksi

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga akan melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

b. Metode Analisis Data

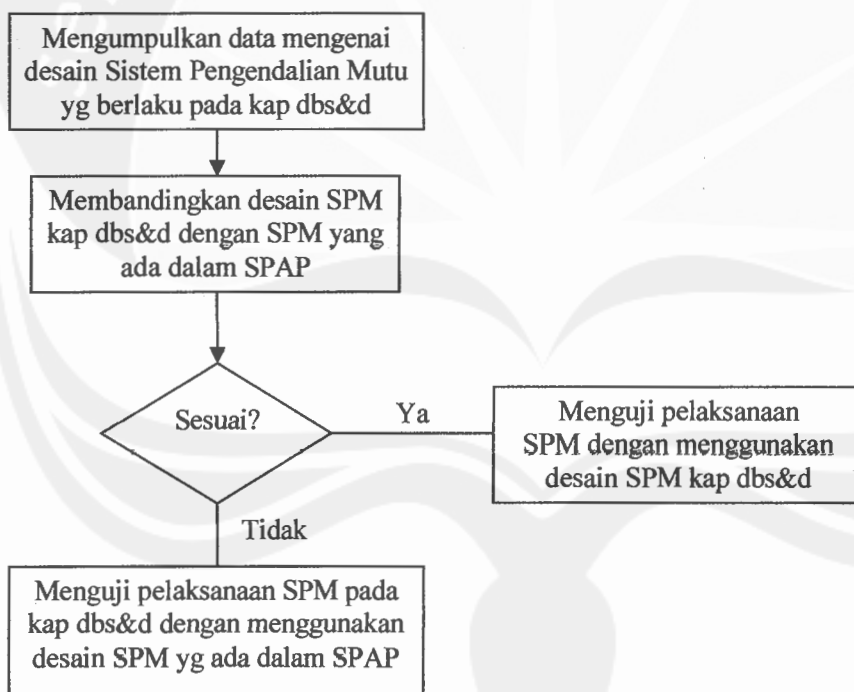
Untuk menguji kepatuhan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah

1. Mengumpulkan data mengenai desain Sistem Pengendalian Mutu yang berlaku pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta.
2. Membandingkan desain SPM kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta dengan SPM yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
3. Jika desain SPM pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta sesuai SPAP, maka pengujian pelaksanaan

Sistem Pengendalian Mutu akan dilakukan dengan menggunakan desain SPM KAP Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta.

4. Jika desain SPM pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta tidak sesuai dengan SPAP, maka pengujian pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu akan dilakukan dengan menggunakan desain SPM yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Berikut ini bagan alir yang akan menjelaskan metode analisis data :



I.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Bab ini berisi pengertian dan tujuan auditing, pengertian dan tujuan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik, unsur-unsur sistem pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan dan aturan etika kompartemen akuntan publik

Bab III : Gambaran umum kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta

Bab ini berisi profil KAP, struktur organisasi KAP, jenis jasa yang ditawarkan, klien dan desain Sistem Pengendalian Mutu kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini berisi pengujian kepatuhan dengan membandingkan desain sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta dengan standar pengendalian mutu yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta.

Bab V : Kesimpulan dan saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari uji kepatuhan yang telah dilakukan dan saran untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian mutu pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmadji dan Dadang kantor Yogyakarta.

